



# Ahok: Pengelolaan Aset Kacau

**JAKARTA (Pos Kota) – Kerjasama pengelolaan aset sering merugikan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Ahok segera mengevaluasi seluruh kontrak kerjasama dengan swasta.**

Di masa datang kerjasama pengelolaan harus menggunakan sistem Built Transfer Operasional (BTO). "Saya akan ubah sekarang perjanjian BTO semua. Jadi dia sudah bangun lalu transfer itu aset punya DKI, baru operasikan. Jadi kalau macet saya sita itu," ujar di Balaikota, Selasa (30/6).

Ia mencontohkan beberapa perjanjian yang merugikan DKI antara lain pembangunan Pasar Blok A Tanah Abang dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Pasalnya, DKI justru harus membayar Rp

400 miliar/tahun, padahal lahan yang digunakan adalah milik DKI.

Contoh lain adalah Sea World, Ancol. Dalam perjanjian BOT selama 30 tahun, namun saat sudah selesai pengelola menolak menyerahkan dan meminta tambahan waktu 20 tahun lagi. Menurut Ahok, pengelolaan aset di ibukota kacau balau sehingga harus diperbaiki mulai sekarang.

**TEMAN AHOK**

Sementara itu, memuluskan Ahok maju melalui jalur independen pada Pilkada

tahun 2017, tim relawan bentuk komunitas 'Teman Ahok' untuk mengumpulkan foto copy KTP warga Jakarta.

Amalia Ayuningtyas, juru bicara 'Teman Ahok' mengatakan, mereka sudah bergerak di lima wilayah kota. Gerakan komunitas relawan "Teman Ahok" tersebut mengirimkan sejumlah karangan bunga ke Balaikota.

KTP dikumpulkan dengan cara mendatangi langsung rumah warga ataupun meminta warga untuk mengirimkan foto kopi ke sekretariat "Teman Ahok" di Kompleks Graha Pejaten Nomor 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (john/st/ird)